

DIMENSI PRAGMATISME POLITIK SEBAGAI BAGIAN DARI KEBUTUHAN MASYARAKAT MODERN DALAM KONTESTASI PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN (STUDI ILMU PSIKOLOGI DALAM DIMENSI POLITIK MODERN)

Ahmad Burhan Hakim¹⁾, Satryo Pringgo Sejati²⁾

¹⁾Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²⁾Universitas Papua, Indonesia

e-mail Correspondent: burhanhakim@insud.ac.id

Received: 13-02-2025

Revised: 30-03-2025

Accepted: 14-04-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Democracy, Politicians, Transactional Politics.*

Democracy has become a political system that has been used massively in Indonesia since the reformation rolled in 1998. Elections are one of the major agendas of the government and state to be called a democratic country. In the 2024 election, there were allegations of pragmatic politics and transactional politics in Lamongan Regency. This is one of the important social facts amidst the rampant campaign about democratization in Indonesia. With this kind of incident, political costs are high, because there is or there is a lot of technical money rolling during the election. This study uses a descriptive qualitative research method supported by a literature study as part of the analytical tool to reveal facts and field findings in the study. Pragmatic attitudes and transactional political activities in Lamongan Regency do not appear in a vacuum but have become a massive social phenomenon and seem to be an open secret. Both politicians, legislative candidates and the community in Lamongan Regency consider these activities to be something that is not strange and ordinary, so that this pragmatic attitude cannot only be directed at politicians but also the majority of the community does want this. Thus, democracy is not only a matter of political development and the exchange of ideas about a welfare state, but on the other hand, it gives rise to high-cost politics due to transactional and pragmatic politics.

Abstrak.

Kata kunci: Demokrasi, Politisi, Politik Transaksional

Demokrasi menjadi sistem politik yang mulai digunakan di Indonesia secara massif sejak reformasi bergulir tahun 1998. Pemilu menjadi salah satu agenda besar pemerintah dan negara untuk bisa dikatakan sebagai negara demokratis. Pada pemilu tahun 2024 yang lalu terjadi adanya dugaan politik pragmatis dan politik transaksional di Kabupaten Lamongan. Hal ini menjadi salah satu fakta sosial penting ditengah maraknya kampanye tentang demokratisasi di Indonesia. Dengan adanya kejadian semacam ini membuat biaya politik menjadi tinggi, karena ada atau uang teknis tersebut banyak bergulir pada saat pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang ditunjang dengan studi Pustaka sebagai bagian dari pisau analisis untuk mengungkapkan fakta dan temuan lapangan dalam penelitian. Sikap pragmatis dan adanya kegiatan politik transaksional di Kabupaten Lamongan tidak muncul dalam ruang hampa namun sudah menjadi fenomena sosial yang begitu massif dan seolah sudah menjadi rahasia umum. Baik politisi, caleg dan masyarakat di Kabupaten Lamongan menganggap kegiatan tersebut adalah suatu hal yang tidak aneh dan biasa saja, sehingga sikap pragmatis tersebut tidak bisa hanya ditujukan pada para politisi namun juga masyarakat sebagai besar memang menginginkan hal tersebut. Dengan demikian maka demokrasi tidak hanya persoalan pembangunan politik dan adu gagasan tentang negara sejahtera namun disisi lain menimbulkan adanya politik biaya tinggi yang disebabkan adanya politik transaksional dan pragmatis tersebut.

PENDAHULUAN

Politik Pragmatis adalah suatu pendekatan dalam politik yang menekankan pada pertukaran kepentingan antara individu atau kelompok, sering kali mengedepankan hasil pragmatis daripada ideologi. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks negosiasi dan aliansi, di mana berbagai pihak berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan demi mendapatkan dukungan atau sumber daya. Sistem politik transaksional dapat menghasilkan solusi yang cepat dan efisien, namun sering kali mengabaikan nilai-nilai jangka panjang serta kepentingan publik yang lebih luas. Penting untuk mempertimbangkan dampak dari politik transaksional ini, karena meskipun dapat menghasilkan hasil yang segera, ia juga berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat jika keputusan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Sistem ini juga dapat memicu munculnya praktik korupsi dan nepotisme, di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kesejahteraan umum.

Penting untuk mengevaluasi bagaimana politik transaksional dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintahan, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dalam jangka panjang. Sistem politik yang berfokus pada transaksi sering kali mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat. Membangun kembali hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, di mana suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas tindakan pemerintah.

Meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi ketidakpuasan sosial yang sering muncul akibat kebijakan yang dianggap tidak representatif. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi rakyat yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Langkah-langkah ini akan menciptakan sebuah ekosistem politik yang lebih sehat, di mana dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dapat berkembang, mendorong inovasi dan solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah sosial.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan mekanisme yang memfasilitasi komunikasi dua arah dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar serta diakomodasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan yang diimplementasikan dan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan kolaborasi yang erat antara semua pihak, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Uang politik, sering disebut sebagai “politik uang,” dapat secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan dan merusak proses demokrasi. Praktik ini dapat menciptakan ketidakadilan, di mana kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar mendapatkan keunggulan tidak adil atas pesaing mereka, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Hal ini juga dapat menyebabkan korupsi yang lebih luas, di mana keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan finansial daripada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga dapat mengarah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yakni pendekatan ilmu sosial dan politik yang kemudian di kosentrasikan pada pengembangan ilmu psikologi. Dimana ada suatu gejala sosial dan politik yang mampu dijelaskan dengan pendekatan psikologi. Dengan temuan semacam ini maka penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deksripsi, penjelasan terkait fakta-fakta atau temuan yang secara komprehensif akan dijelaskan menggunakan beberapa teori-teori sosial maupun psikologi. Studi Pustaka juga penulis gunakan untuk memudahkan penelitian yang berguna untuk melakukan tinjauan akademis terkait isu yang sedang dibahas. Penulis juga melakukan obeservasi dan interview juga 87-04-2024. Data primer memang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder yang penulis dapatkan dari internet, buku, koran atau majalah digunakan sebagai data

pendukung untuk lebih melengkapi khasanah kelimuan dan data temuan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Politik Transaksional dan Pragmatisme Masyarakat di Kabupaten Lamongan

Politik transaksional di Kabupaten Lamongan mencerminkan bagaimana kepentingan individu dan kelompok sering kali mendominasi proses pengambilan keputusan, mengarah pada dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat. Proses ini sering kali menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan antar pihak, namun juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik ketika kepentingan tersebut tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting bagi pemangku kepentingan untuk memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat luas agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan stabilitas sosial. Masyarakat di Kabupaten Lamongan perlu dilibatkan secara aktif dalam dialog dan partisipasi politik, sehingga mereka memiliki suara yang kuat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Keterlibatan ini tidak hanya akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Pentingnya membangun saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam setiap inisiatif pembangunan. Membangun forum diskusi yang rutin dan inklusif dapat menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa setiap suara didengar, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka secara langsung kepada pengambil kebijakan.

Menyediakan platform yang aman dan terbuka untuk dialog ini tidak hanya akan meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merumuskan solusi yang inovatif dan relevan bagi tantangan yang dihadapi. Hal ini juga akan menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat terhadap proses pembangunan, sehingga mereka lebih berkomitmen untuk mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan setiap program yang dijalankan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, proses pembangunan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan warga. Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat memperkaya perspektif yang ada, memungkinkan pengambil kebijakan untuk memahami kebutuhan dan harapan yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat.

Namun senyatanya hubungan antar kepentingan politik dan massa hanya berkuat pada saat pemilu berlangsung. Dominasi politik transaksional dan pragmatisme menjadi mesin utama dalam kemenangan pemilu. Masyarakat tidak mampu membentuk hubungan cek and balance terhadap wakilnya di dewan atau bahkan pemerintahan yang diwakili oleh bupati terpilih. Semua seakan selesai pada proses transaksi jual beli suara yang begitu massif. Hal ini pun juga diakui oleh banyak mayoritas caleg yang berebut suara pada pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan.

88 Mereka menyatakan bahwa kami tidak akan mampu mendapat suara rakyat secara maksimal apabila tidak ada pelican yang digunakan ketika pemilu berlangsung, dan

terkadang ketika dana teknis tersebut sudah bergulir tidak jadi jaminan seseorang caleg tersebut mampu mengamankan kursinya. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut nyata terjadi. Belum lagi ada beberapa pendapat dari masyarakat awam atau bahkan tokoh masyarakat di Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa politik uang tersebut menjadi penting adanya karena hal tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Sehingga secara umum kegiatan politik transaksional dan pragmatis tersebut memang menjadi kehendak dua belah pihak. Baik actor yakni politisi atau caleg tersebut terhadap objeknya yakni masyarakat pemilih. Dengan kenyataan seperti ini tentu agaknya sulit apabila mau dihilangkan karena mereka sama melakukan kegiatan pragmatis tersebut.

2. Studi Ilmu Psikologi dan Sikap Pragmatisme Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perspektif psikologis mempengaruhi sikap pragmatis masyarakat dalam memilih, serta dampaknya terhadap hasil pemilu yang akan datang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor psikologis yang mendasari keputusan memilih, serta rekomendasi bagi para calon dan partai politik untuk menyusun strategi kampanye yang efektif. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat merancang pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga proses demokrasi berjalan dengan lebih adil dan transparan. Penelitian ini juga akan menganalisis peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku pemilih, mengingat semakin meningkatnya penggunaan platform digital sebagai sumber informasi utama di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi bagaimana algoritma dan konten yang dibagikan di media sosial dapat membentuk persepsi pemilih serta dampaknya terhadap partisipasi politik secara keseluruhan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh media sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh calon dan partai politik untuk menjangkau audiens mereka secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media sosial, termasuk penyebaran informasi yang salah dan polarisasi opini, yang dapat menghambat proses demokrasi yang sehat. Salah satu aspek penting yang perlu diteliti adalah bagaimana pengguna media sosial dapat dilibatkan dalam dialog konstruktif, sehingga menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih terbuka dan inklusif di antara berbagai kelompok masyarakat.

Dengan menciptakan platform yang memfasilitasi interaksi positif, calon dan partai politik dapat membangun kepercayaan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Membangun strategi komunikasi yang efektif juga memerlukan pemahaman mendalam tentang demografi audiens, sehingga pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok. Hal ini akan membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterima dengan baik, sehingga mendorong partisipasi aktif dan mengurangi risiko misinformasi yang sering kali terjadi di media sosial.

Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan berbasis data ini akan memperkuat demokrasi serta menciptakan lingkungan di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan teknologi komunikasi modern, proses ini dapat dicapai transparansi yang lebih tinggi dan akuntabilitas dalam sistem politik. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil,

dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung komunikasi efektif dan partisipatif, serta memastikan bahwa setiap individu merasa memiliki peran dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung komunikasi efektif dan partisipatif, serta memastikan bahwa setiap individu merasa memiliki peran dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Secara psikologis sebenarnya masyarakat ingin melihat pemimpin mereka mampu untuk bisa menjadi wadah aspirasi bagi mereka. Sehingga suara yang mereka sumbangkan terhadap para caleg maupun politisi secara tidak langsung mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri. Hanya saja secara sosiologis hal tersebut agaknya sulit untuk diwujudkan. Pola pikir pragmatis dan transaksional yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Lamongan seperti sudah masuk dalam alam bawah sadar, dialog sumbang yang ada di beberapa warung kopi di Kabupaten Lamongan lebih cenderung membahas berapa isi amplop yang akan di dapat oleh mereka, bukan pada persoalan konstruktif terkait pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur atau bahkan pembangunan politik yang baik untuk Kabupaten Lamongan. Obrolan yang asyik mereka lakukan sebatas bahwa masyarakat memang memilih calonnya berdasarkan seberapa besar isi amplop atau dana teknis yang mereka dapatkan.

Temuan di lapangan menyatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Lamongan tidak menolak adanya politik transaksional dan pragmatis yang ada. Sehingga hal tersebut menyebabkan biaya politik yang tinggi, sulit kiranya hal tersebut untuk dihindarkan mengingat kedua belah pihak setuju akan hal tersebut. Secara psikologis pun mereka tidak masalah dengan kegiatan politik tersebut. Bahkan ada yang menyatakan bahwa untuk terjun dipolitik memang harus punya biaya yang besar, besaran biaya tersebut memang habis untuk biaya-biaya politik transaksional. Keadaan seperti ini sebenarnya miris adanya, mengingat secara konseptual, demokrasi adalah suatu tatanan politik yang berujung dan bersumber pada rakyat. Namun sisi lain demokrasi yang penulis sampaikan sebelumnya ada suatu fakta-fakta sosial berdasarkan temuan penulis di lapangan. Sehingga secara tidak langsung demokrasi juga menimbulkan sikap dan perilaku yang demikian.

KESIMPULAN

Secara umum masyarakat Kabupaten Lamongan tidak menolak adanya politik transaksional dan pragmatis, kondisi ini disebabkan adanya kebiasaan jual beli suara pada saat pemilu terkhusus pada pemilihan umum calon anggota legislatif atau disebut dengan pileg. Kejadian ini juga terjadi pada saat pilkada berlangsung, dimana kejadian yang memuat banyak fakta sosial tersebut membuat biaya politik menjadi tinggi. Sehingga banyak caleg yang mengeluarkan dana yang cukup besar untuk bisa mengamankan kursi mereka. Hal ini pun menjadi dan seolah dianggap wajar, yang kemudian menjadi rahasia umum bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Kondisi seperti ini mungkin juga terjadi di banyak daerah di Indonesia namun belum terungkap dalam suatu tulisan atau bahkan penelitian lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan dari penelitian yang penulis lakukan memang seperti sudah terbiasa dengan keadaan ini. Sehingga politik transaksional atau bahkan politik pragmatis sulit kiranya untuk dihilangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arif, M., & Aprillya, V. (2023). REPRESENTASI KRITIK SOSIAL TERHADAP FENOMENA POLITIK TRANSAKSIONAL PADA KONTEN PARODI POLITIK AKUN INSTAGRAM@ BILLY_FLBS. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 1179-1184.

Arrsa, R. C. (2014). Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.

Ashar, A. (2022). Politik Transaksional dan Implementasinya terhadap demokrasi di Kalimantan Timur dalam tinjauan siyasah syar'iyah.

Gumelar, R. G., Ahmad, I., & Mukhroman, I. (2021). Pengaruh transaksional elit politik terhadap model komunikasi politik pilwalkot Serang 2018. *Jurnal Kajian Komunikasi FIKOM UNPAD*, 9(1), 94-107.

Hakim, A. B., & Muhyidin, M. (2022). Demokrasi dan Politik Biaya Tinggi (High Cost Politics). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(01), 12-22.

Halim, A. (2014). Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014). *Jurnal Humanity*, 9(2).

Indora, V., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2014). Pengaruh Politik Transaksional terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Doctoral dissertation, Lampung University).

Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.

Nahdi, K. (2014). Pragmatisme Semu Demokrasi Dan Kendala Acuan Pendidikan Karakter; Fenomena Politik Transaksional Pemilu Legislatif 2014 Di Lombok Timur. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 4(2), 192-206.

Nizar, M., & Alqarni, W. (2021). *Book Series Demokrasi dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal (Vol. 1)*. Syiah Kuala University Press.

Pagala, H. A., & SHI, M. (2021). *Politik Transaksional*. Bening Media Publishing.

Purwati, D. Pragmatisme partai islam: studi tentang perekrutan calon legislatif artis oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Pusida, R., Pati, A., & Lambey, T. (2018). Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Studi Tentang Efektivitas Kampanye). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Sangkoy, R., Lopian, M., & Gosal, R. (2019). Perilaku politik pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Solihah, R. (2016). Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.

Sudirman, L. (2012). Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Diktum*, 99-110.

Sugiyanto, B. (2020). Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 74-88.

perspektif etika politik Islam. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 7(3), 1008-1016.

Wawancara

Hasil Observasi yang dilakukan selama bulan November 2024 sampai Januari 2025 di Kabupaten Lamongan.

Hasil Wawancara dengan salah satu caleg di Kabupaten Lamongan dilakukan pada 22/04/2024 Pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Awam di Kabupaten Lamongan dilakukan pada 01/05/2024 Pukul 12.00 WIB dan 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Pantura Kabupaten Lamongan dilakukan pada 15/03/2024 Pukul 19.30 WIB.